



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTINA SRI LESTARI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 794448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.405.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/6 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/12 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG STANDART Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO 110 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.030.303

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.537.530.303

III. HUTANG Rp. 113.546.250

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.423.984.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YASIN
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 449801

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/81 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	123.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTO/ SCUTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.120.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.718.071
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	871.838.071
III. HUTANG	Rp.	155.741.842
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	716.096.229

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.